

PENGUKURAN KINERJA UNIT KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PERSPEKTIF VALUE FOR MONEY

Yuly Indah Setiyawati
YulyakutanS1@yahoo.co.id
Ikhsan Budi Riharjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the work performance model of the implementation of program and activity on Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo which is carried out by using the Value for Money performance measurement perspective. The descriptive qualitative is used as the data analysis technique which is done by collecting, processing, and presenting the data that has been obtained in the form of complete and accurate information, so the researcher is easier to gain description about the characteristic of this object. The data collection technique has been done by performing interview and documentation. Based on the result of the research, it shows that Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo has successfully achieved the expected efficient and effective economic level. The economic performance is smaller than the budget when it is considered from the amount of the realization. The efficiency of the performance can be seen from the comparison between the input and the output in which the work plan program and institution activities can be achieved and realized in accordance with the planned target. Meanwhile the effectiveness of the performance can be seen from the results of the achievement of target performance indicators in achieving an organization's objective in which the results of activities to achieve the objective can be realized in accordance with the expected targets. Although the efficiency and effectiveness of the economic performance of Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo has been reached, however, the development of the Value for Money performance indicator is still required, so it can explain the achievement of the performance of Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo comprehensively.

Keywords: *Performance, Value For Money, Economic, Efficiency, Effectiveness.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui model pengukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dengan perspektif *Value For Money*. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data yang diperoleh berupa keterangan yang lengkap dan benar, sehingga peneliti lebih mudah memperoleh gambaran mengenai sifat (karakteristik) obyek dari data tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumenter dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan telah berhasil mencapai tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Kinerja ekonomi dilihat dari jumlah realisasi lebih kecil dari jumlah anggaran. Kinerja efisiensi dilihat dari perbandingan antara *output* dengan *input*, dimana rencana program kerja dan kegiatan instansi dapat dicapai dan direalisasikan sesuai dengan target yang direncanakan. Sedangkan kinerja efektivitas dapat dilihat dari hasil-hasil pencapaian indikator kinerja sasaran dalam mencapai suatu tujuan organisasi, dimana hasil kegiatan untuk mencapai tujuan dapat direalisasikan sesuai dengan program yang dicanangkan. Meskipun kinerja ekonomi, efisiensi dan efektivitas tercapai, namun demikian masih diperlukan pengembangan terhadap indikator kinerja *Value For Money*, sehingga dapat menjelaskan secara komprehensif capaian kinerja Dinas Pendidikan.

Kata kunci: Kinerja, *Value For Money*, ekonomi, efisiensi, efektivitas

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang memasuki masa pemulihan akibat krisis perekonomian. Seluruh pihak termasuk pemerintah mencoba mengatasinya dengan melakukan perubahan di berbagai bidang. Salah satu upaya untuk memulihkan

kondisi perekonomian, sosial, serta politik adalah dengan mengembalikan kepercayaan rakyat yang telah diamanatkan kepada mereka.

Sektor publik sering dinilai tidak produktif, tidak efisien, sumber kebocoran dana, rendah kualitas, miskin inovasi serta kreativitas, dan instansi yang selalu merugikan dan berbagai kritikan lainnya. Munculnya kritik keras yang ditujukan kepada organisasi sektor publik tersebut kemudian muncul gerakan untuk melakukan reformasi manajemen sektor publik. Salah satunya adalah munculnya konsep manajemen publik modern yang lebih dikenal dengan *New Public Management*. Tujuan *New Public Management* adalah menjadikan sektor publik yang efektif dan efisien. Kondisi ini yang mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat. Pengukuran kinerja instansi pemerintahan merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, antara lain: *Pertama*, pengukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus memperbaiki kinerja pemerintah; *Kedua*, ukuran kinerja digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan; *Ketiga*, ukuran kinerja dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009: 121). Pengukuran kinerja akan melihat seberapa jauh kinerja instansi yang telah dihasilkan dalam satu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan. Namun upaya tersebut sepertinya belum didukung sepenuhnya oleh birokrasi dikarenakan belum tercapainya *good government*. Hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya kasus-kasus yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. Kasus-kasus tersebut antara lain berupa praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh instansi dan birokrasi yang dimiliki oleh pemerintah. Menanggapi adanya beberapa kasus tersebut masyarakat menuntut adanya akuntabilitas terhadap program-program serta realisasi anggaran yang dikelola oleh instansi pemerintah. Salah satu instansi pemerintah yang rawan terjadinya kecurangan adalah pada sektor pendidikan.

Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa, hal ini dikarenakan pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mengembangkan kepribadian serta potensi diri setiap individu. Peran dunia pendidikan menjadi penting dalam mengantisipasi persaingan di era globalisasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil sehingga diharapkan mampu bersaing. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki berbagai program yang mendukung. Banyak program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo memiliki dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat, selain itu perlu adanya evaluasi pada program yang telah dilaksanakan oleh instansi agar program yang akan datang dapat dicapai lebih maksimal. Dalam hal ini salah satu alat yang dapat digunakan sebagai pertanggung jawaban kinerja adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

LAKIP merupakan dokumen yang memuat akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah yang membandingkan perencanaan dan hasil dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, yang dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja pemerintah yang digunakan oleh penulis adalah mengukur hubungan antara *input*, *output* dan *outcome* sehingga kita dapat melihat efektivitas dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Untuk mengetahui kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perspektif *Value For Money*.

Value For Money (VFM) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Menurut Anggadini (dalam Herawati, 2012) VFM memiliki peranan yang penting dalam terwujudnya kualitas pelayanan publik, apabila VFM dapat diterapkan dengan baik maka kualitas pelayanan publik dapat terwujud seiring dengan perkembangan VFM itu sendiri, dan begitupun sebaliknya apabila VFM tidak diterapkan dengan baik maka kualitas pelayanan publik pun tidak akan maksimal. Beberapa hasil penelitian yang juga meneliti kinerja sektor publik berdasarkan perspektif VFM antara lain, penelitian Nugrahani (2007), menyimpulkan bahwa berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran propinsi DIY dari tahun 2001-2004 secara absolute cukup ekonomis, efisien, dan efektif. Apabila kinerja berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan konsep *Value For Money*, maka kinerja keuangan pemerintah daerah DIY cukup ekonomis, dan efisien, tetapi kurang efektif.

Penelitian Azizah (2010), menunjukkan bahwa setiap kegiatan operasional pada KPP Pratama Pasuruan dipastikan ekonomis, termasuk pelaksanaan program atau fasilitas atau kebijakan *sunset policy*. Pelaksanaan *sunset policy* pada KPP Pratama Pasuruan telah berjalan efisien, didasarkan pada hasil kerja yang telah dicapai dan dibandingkan dengan penggunaan sumber daya. Pelaksanaan *sunset policy* telah berjalan efektif, karena mampu mencapai tujuan dari *sunset policy* itu sendiri, seperti meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakannya, dan memperbaiki sistem administrasi perpajakan.

Penelitian Annisa (2011) menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Makasar telah melaksanakan kinerjanya dengan ekonomis, nilai efisiensi pada ketiga program menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini terlihat dari *output* pada setiap program yang penulis teliti mampu menghasilkan *output* yang maksimal dengan *input* yang telah ditentukan. Pengukuran nilai efektivitas, Dinas Kesehatan Kota Makasar belum mencapai hasil maksimal yang dirasakan kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model pengukuran kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dengan perspektif pengukuran kinerja VFM.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Organisasi Sektor Publik

Dalam kehidupan kita sehari-hari, keberadaan organisasi sektor publik dapat dilihat di sekitar kita. Institusi pemerintah, partai politik, ta'mir masjid, sekolah-sekolah, rumah sakit, dan puskesmas termasuk organisasi sektor publik. Menurut Ulum (2004: 1) organisasi sektor publik merupakan sebuah entitas ekonomi yang memiliki keunikan tersendiri. Di sebut sebagai entitas ekonomi yang tidak kecil, bahkan sangat besar. Organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan tetapi berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk mencari laba (nirlaba).

Organisasi Sektor Publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, sejumlah perusahaan dimana pemerintah mempunyai saham (BUMN dan BUMD), organisasi bidang pendidikan, organisasi bidang kesehatan (Mahsun, 2007: 11).

Pengertian Kinerja

Bastian (2006: 274) berpendapat bahwa kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Sedangkan menurut pernyataan PP 8 tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil kinerja suatu instansi.

Indikator Kinerja

Lohman (dalam Mahsun, 2007: 71) menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan efisiensi serta berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator setiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada titik pelayanan yang dihasilkan. Penentuan indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut: (a) Biaya pelayanan (*cost of service*), indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya unit (*unit cost*), misalnya biaya unit pelayanan. Beberapa pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya, karena *output* yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan; (b) Penggunaan (*utilization*), indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan antara jumlah pelayanan yang ditawarkan dengan permintaan publik; (c) Kualitas atau standar Pelayanan (*quality andstandarts*), indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan indikator yang paling sulit diukur, karena menyangkut cepat atau lambat pertimbangan yang sifatnya subjektif; (d) Cakupan pelayanan (*coverect*), indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebijakan yang mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat pelayanan minimal yang telah ditetapkan; (e) Kepuasan (*satisfaction*), indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode jejak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah, metode penjangkaran aspirasi masyarakat dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan.

Mahmudi (2013: 157) menjelaskan bahwa karakteristik indikator kinerja yang baik antara lain sebagai berikut: *Pertama*, konsistensi yaitu indikator kinerja harus tidak berubah karena waktu yang berbeda atau untuk unit yang berbeda; *Kedua*, dapat diperbandingkan, syarat keterbandingan ini sangat penting karena pengukuran kinerja tidak bersifat mutlak akan tetapi relatif terhadap waktu atau terhadap unit kerja lainnya; *Ketiga*, jelas, yaitu indikator kinerja harus jelas dan sederhana agar mudah dipahami. Kejelasan indikator kinerja menyangkut kejelasan ukuran yang digunakan terhadap kinerja yang diukur; *Keempat*, dapat dikontrol, yaitu indikator kinerja harus dapat dikembangkan dan dapat digunakan manajemen untuk alat pengendalian; *Kelima*, kontijensi (*contigency*), yaitu indikator kinerja yang dikembangkan harus dapat mengikuti berbagai perubahan lingkungan yang mungkin terjadi; *Keenam*, komprehensif, yaitu indikator kinerja dapat merefleksikan semua aspek yang akan diukur, termasuk aspek perilaku; *Ketujuh*, fokus, yaitu indikator kinerja harus berfokus pada sesuatu yang diukur. Untuk menghasilkan indikator kinerja yang fokus, perlu dibuat indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicator*). Indikator kunci adalah indikator level tinggi yang memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja suatu program, aktivitas atau organisasi; *Kedelapan*, relevan, yaitu indikator kinerja harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi; *kesembilan*, realistis, yaitu target yang ditetapkan harus didasarkan pada harapan yang realistis sehingga memungkinkan untuk dicapai.

Pemerintah Daerah (Satuan Kerja Pemerintah Daerah)

Pernyataan UU No. 22 tahun 1999 (pasal 7 ayat 1), Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus seluruh bidang tugas pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah membentuk Satuan Kerja Pemerintah Daerah sebagai pusat pertanggungjawaban yang dipimpin oleh seorang kepala satuan kerja dan bertanggungjawab atas entitasnya. Satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah antara lain Badan Pengawasan Daerah dan Perencanaan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pekerjaan Umum, Kesehatan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM, Pendapatan Daerah, Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi dan entitas lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

LAKIP merupakan sebuah laporan yang disusun berdasarkan siklus anggaran berjalan selama 1 tahun, memuat akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah yang membandingkan perencanaan dan hasil dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta dampak adalah dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja. Untuk pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota, instansi pemerintah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah suatu unit kerja pemerintah yang diberikan hak dan tanggungjawab untuk mengelola sendiri administrasi dan keuangan. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Misalkan dalam satu kegiatan target yang akan dihasilkan adalah 100 orang yang akan terlatih, kemudian setelah kegiatan tersebut dilaksanakan berapa jumlah yang terlatih, apakah masih tetap dengan 100 orang, kurang dari 100 orang atau mungkin lebih dari 100 orang.

Pengukuran Kinerja

Robertson (dalam Mahsun, 2006: 145) berpendapat bahwa pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk info atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan). Sementara itu Mardiasmo (2009: 121) berpendapat bahwa pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Secara umum, tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2009: 122) yaitu sebagai berikut: (a) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik; (b) Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat di telusuri pencapaian strategi; (c) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence* (keselarasan tindakan dalam pencapaian tujuan organisasi); (d) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Sedangkan Mahmudi (2013: 74) menjelaskan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja yaitu sebagai berikut: *Pertama*, mengetahui tingkat ketercapaian organisasi, pengukuran kinerja pada

organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan organisasi. Penilaian organisasi bertujuan sebagai tonggak (*milestone*) yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah menyimpang dari tujuan yang ditetapkan; *Kedua*, menyediakan sarana pembelajaran pegawai, merupakan pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategi organisasi serta mewujudkan visi dan misinya; *Ketiga*, memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya, pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan di masa mendatang; *Keempat*, memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*); *Kelima*, memotivasi pegawai; *Keenam*, menciptakan akuntabilitas publik, merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik.

Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Bastian (2006: 275) berpendapat bahwa manfaat pengukuran kinerja antara lain: (a) Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja; (b) Memastikan tercapainya kinerja yang telah disepakati; (c) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dengan membandingkan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang; (d) Memberikan penghargaan dan hukuman yang obyektif atas prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati; (e) Menjadi alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi; (f) mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi; (g) Memahami proses kegiatan instansi pemerintah; (h) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif; (i) Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan; (j) Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Elemen Pokok Pengukuran Kinerja

Mahsun (2007: 24) mengungkapkan bahwa elemen pokok pengukuran kinerja meliputi: *Pertama*, menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi dengan berpedoman pada visi dan misi. Berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi tersebut selanjutnya dapat ditentukan indikator dan ukuran kinerja secara tepat; *Kedua*, merumuskan indikator dan ukuran kinerja, indikator kinerja mengacu pada penilaian secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja; *Ketiga*, mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi dengan membandingkan hasil aktual serta indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan; *Keempat*, evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi.

Fokus Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja harus didasarkan pada karakteristik operasional organisasi. Hal ini terutama diperlukan untuk mendefinisikan indikator dan ukuran kinerja yang digunakan. Organisasi dengan karakteristik operasional yang berbeda membutuhkan ukuran kinerja yang berbeda pula. Suatu pengukuran kinerja yang didasarkan atas karakteristik operasional ini antara lain bermanfaat untuk mengkuantifikasi tingkat efisiensi

dan efektivitas suatu pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dengan indikator dan ukuran kinerja yang sesuai dengan jenis kegiatan organisasi maka pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai dasar melakukan perubahan, penghapusan, dan perbaikan sehingga hasil operasi mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pandangan tradisional terhadap pengukuran kinerja organisasi sering hanya menekankan pada minimasi biaya (*input*), misalnya dengan penghematan biaya operasional, dan keberhasilan memproduksi sejumlah *output* tertentu. Sistem pengukuran kinerja modern selain menilai *input* dan *output* juga menilai tingkat fleksibilitas organisasi melayani pelanggan sehingga pengukuran kinerja menjadi lebih luas cakupannya karena mempertimbangkan kepuasan pelanggan. Tujuan utama organisasi sektor publik adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan publik (masyarakat) sebagai pengguna atas jasa layanan atau produk yang dihasilkan. Dengan demikian fokus pengukuran kinerja sektor publik terletak pada *outcome* (hasil), bukan pada *input* dan proses (Mahsun, 2007: 150).

Aspek-Aspek Pengukuran Kinerja

Bastian (2006: 267) berpendapat bahwa aspek-aspek pengukuran kinerja terdiri atas: (a) kelompok masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. *Input* ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan; (b) kelompok keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik/non fisik; (c) kelompok hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung); (d) kelompok manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan; (e) kelompok dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Konsep Value For Money (VFM)

Mahmudi (2013: 83) menjelaskan bahwa konsep pengukuran kinerja VFM merupakan pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Pengukuran kinerja VFM merupakan bentuk pengukuran kinerja yang spesifik dan unik pada organisasi sektor publik. Karena pentingnya konsep tersebut, maka seringkali dikatakan bahwa inti pengukuran kinerja sektor publik adalah untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. VFM memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Konsep VFM terdiri atas tiga elemen utama, yaitu: (1) Ekonomi, terkait dengan pengkonversian *input* primer berupa sumber daya keuangan (uang/kas) menjadi *input* sekunder berupa tenaga kerja, bahan, infrastruktur, dan barang modal yang dikonsumsi untuk kegiatan operasi organisasi. Konsep ekonomi sangat terkait dengan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya *input* hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah, yaitu harga yang mendekati harga pasar; (2) Efisiensi, Jika ekonomi hanya berbicara mengenai input, yaitu bagaimana memperoleh *input* dengan biaya atau harga yang lebih rendah, maka efisiensi berbicara mengenai *output* dan *input*. Efisiensi terkait dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut; (3) Efektivitas, terkait dengan hubungan antara hasil dengan yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Bastian (2006: 208) menjelaskan bahwa tolak ukur dalam anggaran belanja suatu organisasi, baik organisasi yang berorientasi laba (*swasta*) maupun organisasi nonprofit (sektor publik) adalah *Value For Money* yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas, dan ekonomi. Dimana pengertian dari masing-masing elemen tersebut yaitu: *Pertama*, Efisiensi

adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu. Dengan kata lain efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efisiensi merupakan hal terpenting di antara ketiga hal tersebut. Suatu organisasi dirasa semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas satu. Semakin besar angkanya, semakin tinggi tingkat efisiensinya. Secara absolute, rasio ini tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Namun, berbagai program di dua perusahaan dalam industri yang sama, dapat diperbandingkan tingkat efisiensinya. Apabila rasionya lebih besar dari satu dan dibandingkan dengan hasil rasio program yang sama di perusahaan lain, maka program tersebut bisa disebut lebih efisien; *Kedua*, efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi *output*. Jika suatu organisasi bertujuan membangun suatu rumah sakit dengan 250 tempat tidur, 4 unit operasi, sebuah departemen kecelakaan dan darurat, serta departemen pasien luar dan semua target tersebut tercapai, maka mekanisme kerja organisasi tersebut efektif. Apabila hanya 150 tempat tidur yang terbangun, maka organisasi tersebut tidak bekerja efektif; *Ketiga*, ekonomis adalah hubungan antara pasar dan *input* dimana barang dan jasa dibeli pada kualitas yang diinginkan pada harga terbaik yang dimungkinkan. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Ulum (2004: 271) mengemukakan bahwa VFM merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu .ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Pertama*, ekonomi adalah pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari yang boros dan tidak produktif; *Kedua*, efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu; *Ketiga*, efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Analisis VFM memerlukan data *input* dan *output* yang memadai karena VFM mempunyai kaitan erat dengan pengukuran *output* dan *input*. Permasalahan yang seringkali muncul adalah tidak tersedianya data yang lengkap terutama data *output*. Tidak tersedianya data *output* yang lengkap tidak berarti analisis vfm tidak dapat dilakukan. Karena untuk mengukur *output* sering kali terdapat kesulitan, organisasi sektor publik menggunakan *output* antara atau indikator kinerja. VFM dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya *input* paling kecil untuk mencapai *output* maksimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kampanye implementasi konsep VFM pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas sektor publik dan pelaksanaan *good governance*. Implementasi konsep VFM diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik (Mardiasmo, 2009: 4).

Manfaat Implementasi Value for Money

Manfaat implementasi konsep VFM pada organisasi sektor publik menurut Mardiasmo (2009: 7) antara lain: (1) Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, artinya pelayanan publik yang diberikan tepat sasaran; (2) Meningkatkan mutu pelayanan publik; (3) Alokasi belanja berorientasi pada kepentingan publik; (4) Menurunkan biaya pelayanan

publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*;
(5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

METODE PENELITIAN

Teknik Analisis Data

Dalam pembahasan pada penelitian ini, data yang sudah diperoleh kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang sebelumnya telah dipelajari oleh penulis sehingga dapat ditarik kesimpulan dalam menyelesaikan masalah yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu pengolahan data menggunakan kata-kata untuk mengemukakan uraian-uraian serta penjelasan. Berbagai data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, dan wawancara tidak terstruktur diolah dan dianalisis dengan teori-teori yang ada yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Selanjutnya, dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan, dan sebagai langkah perbaikan diberi saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi instansi pemerintah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Penelitian ini akan mengukur kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 menggunakan tiga elemen penelitian yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dengan pembahasan tersebut akan bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini analisis data yang digunakan pada masing-masing elemen:

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui dari total anggaran yang tersedia pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp 52.139.259.467 pada tahun 2013 yang terealisasi Rp 35.615.379.791 atau 69,11%. Realisasi anggaran pada tahun 2013 kurang dari anggaran, hal ini dikarenakan: Belanja sesuai dengan kebutuhan, Adanya penambahan layanan, Peningkatan kualitas instruktur pelayanan dengan penambahan peralatan pendidik (alat peraga), penambahan luas ruangan dan pemenuhan sarana prasarana dengan kebutuhan sehingga fasilitas pendidikan terpenuhi.

Tabel 1
Data Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2013

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Keterangan
			(Rp)	%	
I	Belanja Tidak Langsung				
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	25.889.890.490	27.323.067.431	105,54	SB
II	Belanja Langsung				
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	4.015.682.050	3.683.075.297	91,72	SB
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	1.650.332.490	1.582.499.250	95,89	SB
3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	671.520.001	391.194.000	58,26	CB
4	Program Pendidikan anak usia dini	2.088.670.240	1.569.197.500	75,13	B
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	13.870.088.136	11.460.048.757	82,62	B
6	Program Pendidikan Menengah	7.510.470.240	2.019.987.072	26,90	KB
7	Program Pendidikan Non Formal	4.319.626.000	1.277.500.650	29,57	KB
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.105.743.000	2.432.938.700	59,26	CB
9	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	602.805.000	374.590.975	62,14	CB
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	8.215.736.500	7.403.992.280	90,12	SB
11	Program Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	2.114.840.400	1.947.990.000	93,39	SB
12	Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan	2.690.945.410	1.182.967.310	43,96	KB
13	Program peningkatan disiplin aparatur	275.000.000	246.095.000	89,49	SB
	JUMLAH	52.139.259.467	35.615.379.791	69,11	CB

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Tabel 2
Data Pencapaian Kinerja Program Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2013

No	Program	Hasil Kinerja	Keterangan
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	91,72%	SB
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	95,89%	SB
3	Programn Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	58,26%	KB
4	Program Pendidikan Anak Usia Dini	75,13%	CB
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	82,62%	B
6	Program Pendidikan Menengah	26,90%	KB
7	Program Pendidikan Non Formal	29,57%	KB
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	59,26%	KB
9	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	62,14%	KB
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	90,12%	SB
11	Program Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	93,39%	SB
12	Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan	43,96%	KB
13	Program peningkatan disiplin aparatur	89,49%	SB
Rata-rata Pencapaian Kinerja Program Dinas pendidikan		69,11%	CB

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Melihat dari hasil capaian di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 mencapai hasil kinerja sebesar 69,11%. hasil yang dicapai cukup baik lebih dari 50% dari target yang ditentukan.

Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari ekonomi

Ekonomi adalah hubungan antara harga pasar dan masukan (*cost of input*). Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan kualitas tertentu pada harga terbaik yang di mungkinkan (*spending less*). Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup juga pengelolaan secara hati-hati atau cermat (*prudency*) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan operasional yang dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu (Ulum, 2004:290).Pengukuran kinerja suatu organisasi sektor publik yang di ukur dari tinjauan ekonomi merupakan pengukuran atau penilaian kinerja organisasi untuk menilai apakah suatu kegiatan operasi telah dijalankan secara ekonomis atau secara hemat. Kegiatan operasi yang dijalankan secara ekonomis atau hemat adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan tingkat biaya minimal tanpa harus mengorbankan hasil yang ingin dicapai. Adapun rincian per program realisasinya adalah sebagai berikut:

Program pelayanan administrasi perkantoran, yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo merupakan program yang secara langsung hasilnya ditargetkan 100%, terdiri dari sembilan sasaran kegiatan dan prosentase realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3
Data pencapaian target kegiatan Pelayanan Administrasi perkantoran
Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

No	Sasara	Target	Realisasi/ Pencapaian	Keterangan
1	Program Keteersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur, Penyedia Jasa komunikasi	100	82.51	B
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100	98.58	SB
3	Penyediaan ATK	100	89.00	SB
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	99.70	SB
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	68.00	CB
6	iaan jasa kebersihan kantor	100	96.50	SB
7	Penyediaan bahan bacaan dan peratur-an perundang-undangan	100	97.05	SB
8	Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor	100	98.05	SB
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	100	96.05	SB
Rata-rata Pencapaian Kinerja sasaran Program Administrasi Perkantoran			91.72	SB

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo merupakan program yang secara langsung hasilnya ditargetkan 100%, terdiri dari lima sasaran kegiatan dan prosentase realisasinya sebagai berikut:

Tabel 4
Data pencapaian kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

No	Sasaran	Target	Realisasi/ Pencapaian	Keterangan
1	pengadaan kendaraan dinas/operasional	100	99.35	SB
2	pengadaan peralatan gedung kantor	100	97.95	SB
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75	96.05	SB
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75	86.23	SB
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	75	99.85	SB
Rata-rata pencapaian kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		85	95.89	SB

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo merupakan program yang secara langsung hasilnya ditargetkan 100%, terdiri dari satu sasaran kegiatan dan prosentase realisasinya sebagai berikut:

Tabel 5
**Data pencapaian kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013**

No	Sasaran	Target	Realisasi/ Pencapaian	Keterangan
1	Rakornis Administrasi Kepegawaian dan keuangan	25	58.26	TB
	Rata-rata pencapaian kinerja Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	25	58.26	TB

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Program pendidikan anak usia dini, yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo merupakan program yang secara langsung hasilnya ditargetkan 100%, terdiri dari empat sasaran kegiatan dan prosentase realisasinya sebagai berikut:

Tabel 6
**Data pencapaian kegiatan pendidikan anak usia dini
Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013**

No	Sasaran	Target	Realisasi/ Pencapaian
1	Pengembangan pendidikan anak usia dini	100	74.14
2	Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	100	73.01
3	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	100	75.33
4	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	100	78.04
	Rata-rata pencapaian kinerja Program pendidikan anak usia dini		75.13

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo merupakan program yang secara langsung hasilnya ditargetkan 100%, terdiri dari satu sasaran kegiatan dan prosentase realisasinya sebagai berikut:

Tabel 7
**Data pencapaian kegiatan Peningkatan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Dinas
Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013**

No	Sasaran	Target (%)	Realisasi/ Pencapaian	Keterangan
1	Pengembangan minat baca dan budaya baca	100	62.14	CB
	Rata-rata pencapaian kinerja Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan		62.14	CB

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo merupakan program yang secara langsung hasilnya ditargetkan 100%, terdiri dari dua puluh sasaran kegiatan dan prosentase realisasinya sebagai berikut:

Tabel 8
Data pencapaian kegiatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

No	Sasaran	Target (%)	Realisasi/ Pencapaian	Keterangan
1	Jumlah Pengadaan sarana penilaian hasil belajar	100	63.10	CB
2	Pengadaan Membeler Sekolah	100	89.00	SB
3	Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah	100	66.35	CB
4	Penyelenggaraan Multi Grade Teaching di daerah terpencil	100	83.30	B
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100	92.02	SB
6	Jumlah Pendataan pendidikan, Kuesioner, profil dan Pr Meilstor	100	82.62	B
7	TK Contoh Type B	100	71.02	B
8	Pelatihan kompetensi peserta didik berprestasi tingkat SD	100	83.02	B
9	Pelatihan Peserta didik berprestasi tingkat SMP	100	96.35	SB
10	Lembaga SD/SDLB menerapkan MBS	100	76.30	B
11	Lembaga SMP/SMPLB menerapkan MBS	100	64.62	CB
12	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik (SD/MI)	100	90.62	SB
13	Pelatihan kompetemsi tenaga pendidik (SMP/MTs)	100	96.00	SB
14	Jumlah Penyelenggaraan try Out jenjang SD	100	77.92	B
15	Jumlah Penyelenggaraan Try Out tingkat SMP	100	64.50	CB
16	Jumlah Penyelenggaraan Penerimaan Peserta didik baru	100	99.50	SB
17	Pembinaan Program Pendidik TK	100	99.07	SB
18	Pelatihan pembuatan penulisan naskah ujian	100	90.64	SB
19	Pelatihan pemantapan bidang studi/ mata pelajaran	100	74.92	B
20	Pelatihan kompetensi tenaga pendidikan bidang study sains tg SD	100	91.60	SB
Rata-rata pencapaian kinerja Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun			82.62	B

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Program peningkatan disiplin aparatur, yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo merupakan program yang secara langsung hasilnya ditargetkan 100%, terdiri dari satu sasaran kegiatan dan prosentase realisasinya sebagai berikut:

Tabel 9
Data pencapaian kegiatan peningkatan disiplin aparatur
Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

N	Sasaran	Target (%)	Realisasi/ Pencapaian	Keterangan
1	Jumlah Seragam pegawai	100	89.49	SB
Rata-rata pencapaian kinerja Program peningkatan disiplin aparatur			89.49	SB

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Program pendidikan menengah, yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo merupakan program yang secara langsung hasilnya ditargetkan 100%, terdiri dari sembilan sasaran kegiatan dan prosentase realisasinya sebagai berikut:

Tabel 10
Data pencapaian kegiatan pendidikan menengah
Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

No	Sasaran	Target (%)	Realisasi/ Pencapaian	Keterangan
1	Pengadaan mebeler sekolah	100	25.5	TB
2	Pengadaan perlengkapan sekolah	100	42.5	TB
3	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah	100	24.7	TB
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah	100	39.00	TB
5	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik	100	26.50	TB
6	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS	100	20.95	TB
7	Lomba peserta didik berprestasi tingkat kecamatan/ kabupaten tingkat SMA	100	26.5	TB
8	Jumlah Pengadaan Tanah Sekolah Menengah	100	12.35	TB
9	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas	100	24.50	TB
Rata-rata pencapaian kinerja Program pendidikan menengah			26.94	TB

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Program pendidikan non formal, yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo merupakan program yang secara langsung hasilnya ditargetkan 100%, terdiri dari lima sasaran kegiatan dan prosentase realisasinya sebagai berikut:

Tabel 11
Data pencapaian kegiatan pendidikan non formal
Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

No	Sasaran	Target (%)	Realisasi/ Pencapaian	Keterangan
1	Pemberdayaan tenaga pendidikan non formal	100	41.98	TB
2	Pembinaan Pendidikan kursus dan kelembagaan pendidikan anak usia dini	100	24.66	TB
3	Pengembangan Pendidikan Keaksaraan	100	39.74	TB
4	Pengembangan Pendidikan kecakapan hidup	100	23.79	TB
5	Pemyediaan Sarana prasana pendidikan non Formal	100	17.66	TB
Rata-rata pencapaian kinerja Program pendidikan non formal			29.57	TB

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Program peningkatan mutu pendidik tenaga kependidikan, yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo merupakan program yang secara langsung hasilnya ditargetkan 100%, terdiri dari lima sasaran kegiatan dan prosentase realisasinya sebagai berikut:

Tabel 12
Data pencapaian kegiatan peningkatan mutu pendidik tenaga kependidikan
Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

No	Sasaran	Target (%)	Realisasi/ Pencapaian	Keterangan
1	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	100	57.05	CB
2	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	100	71.31	B
3	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan	100	60.50	CB
4	Pengembangan sistim penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	100	58.89	CB
5	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	100	48.53	KB
Rata-rata pencapaian kinerja Program peningkatan mutu pendidik tenaga kependidikan			59.26	CB

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Program pemeratan dan perluasan akses pendidikan, yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo merupakan program yang secara langsung hasilnya ditargetkan 100%, terdiri dari empat sasaran kegiatan dan prosentase realisasinya sebagai berikut:

Tabel 13
Data pencapaian kegiatan Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan
Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

No	Sasaran	Target (%)	Realisasi/ Pencapaian	Keterangan
1	Penyelenggaraan Kampanye Pendidikan	100	92.25	SB
2	Penyelenggaraan hari Anak nasional	100	95.50	SB
3	Peningkatan UKS	100	93.13	SB
4	Studi Kelayakan pengembangan sekolah	100	92.69	SB
Rata-rata pencapaian kinerja Program pemeratan dan perluasan akses pendidikan			93.39	SB

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo merupakan program yang secara langsung hasilnya ditargetkan 100%, terdiri dari dua sasaran kegiatan dan prosentase realisasinya sebagai berikut:

Tabel 14
Data pencapaian kegiatan Peningkatan Mutu dan relevansi Pendidikan
Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

No	Sasaran	Target (%)	Realisasi/ Pencapaian	Keterangan
1	Pelatihan Pendidik Inklusi	100	49.34	KB
2	Rehab Gedung Sekolah SD, SMP (DAK)	100	49.37	KB
Rata-rata pencapaian kinerja Program peningkatan mutu dan relevansi pendidikan			49.36	KB

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Program manajemen pelayanan pendidikan, yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo merupakan program yang secara langsung hasilnya ditargetkan 100%, terdiri dari tujuh belas sasaran kegiatan dan prosentase realisasinya sebagai berikut:

Tabel 15
Data pencapaian kegiatan Manajemen Pelayanan pendidikan
Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

No	Sasaran	Target (%)	Realisasi/ Pencapaian	Keterangan
1	Pelaksanaan Evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	100	93.01	SB
2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidang pendidikan	100	92.76	SB
3	Jumlah Pembinaan Dewan Pendidikan	100	97.62	SB
4	Penerapan Sistem dan informasi manajemen pendidikan	100	97.00	SB
5	Penyelenggara-an pelatihan, seminar, dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	100	77.55	B
6	Jumlah Sinkronisasi Rencana Kerja Tahunan (RKT)	100	83.35	B
7	Pembinaan Pembuatan Program Kerja Sekolah dan Pembuatan RKS/RPS	100	83.49	B
8	Pelatihan dan pembinaan tenaga administrasi Sekolah/Jardiknas	100	87.50	SB
9	Jumlah Pengelolaan Operasional Cabang Dinas (UPTD) 18 Kecamatan di Sidoarjo	100	92.50	SB
10	Jumlah Penyusunan Renstra.	100	87.60	SB
11	Jumlah Penyusunan raperbup Pendidkan	100	78.50	B
12	Pendataan Anak Usia Sekolah	100	82.10	B
13	Data Base sarana prasarana sekolah	100	97.05	SB
14	Jumlah pencitraan publik melalui selayang pandang pendidikan	100	98.50	SB
15	Jumlah data dan profil institusi pendidikan secara on line	100	91.50	SB
16	pelaksanaan Evaluasi Diri Sekolah/EDS	100	99.00	SB
17	penyelenggaraan Parenting Pendidikan	100	92.95	SB
Rata-rata pencapaian kinerja Program manajemen pelayanan pendidikan			90.12	SB

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diwujudkan dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2013. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang ditetapkan untuk masing-masing sasaran tersebut. Sampai saat ini keberhasilan program yang dijalankan oleh masing-masing Bidang/Bagian/Sub Bidang/ Sub Bagian di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo secara umum lebih banyak diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran, namun secara bertahap akan terus dilakukan penyempurnaan agar program-program yang

dilakukan oleh masing-masing bagian tersebut dapat diukur keberhasilannya dari indikator hasil.

Berdasar tabel 3 sampai tabel 15 di atas dapat di ketahui bahwa kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2013 di tinjau dari segi ekonomi menunjukkan hasil yang relatif baik. Hal ini dapat dilihat pada jumlah realisasi lebih kecil dari jumlah anggaran. Sehingga dinas tersebut dapat mengestimasi jumlah anggaran yang di buat, lebih kecil dari hasil realisasinya. Oleh karena itu dalam memberikan pelayanan pendidikan di kabupaten Sidoarjo dapat terealisasi dengan baik, dan dilakukan secara ekonomis atau secara hemat dengan biaya yang minimal, dan merealisasikan program dan kegiatan yang menjadi tujuan dari instansi pemerintah, untuk memberikan pelayanan dari program yang dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat dengan biaya yang rendah. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu staf bagian pengembangan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan: "Antara anggaran dengan realisasi selalu berbeda setiap tahun di karenakan sesuai kebutuhan Dinas Pendidikan, misalnya dalam belanja kebutuhan tiap sekolah sesuai kebutuhan, bila ada penambahan pelayanan serta peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan biasanya disertai dengan penambahan peralatan maupun pemenuhan sarana prasarana. Dan jika ada perbedaan antara anggaran dengan realisasi maka sisanya akan di kembalikan ke kas daerah".

Selain itu upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan agar menghasilkan kinerja yang ekonomi misalnya dalam pengadaan barang dan jasa di dinas pendidikan yakni dengan menentukan standart belanja dan membandingkan dengan standart harga di pasaran untuk melaksanakan program atau kegiatan yang telah di tetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu staff kesekretariatan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan: "Dalam pengadaan barang dan jasa dinas pendidikan menggunakan Perpres 70 tahun 2012 sebagai acuan sehingga dalam hal penentuan pelaksanaan kegiatan dapat ditentukan dengan berbagai metode pemilihan yang diperlukan".

Dalam perpres 70 tahun 2012 disebutkan bahwa dalam penentuan pengadaan barang dan jasa terdapat banyak metode pemilihan yang dapat digunakan sesuai dengan keperluan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian dari tahun ke tahun antara realisasi dengan anggaran selalu di tekan seminimal mungkin sehingga selalu lebih kecil realisasi daripada anggaran sehingga dapat di katakan ekonomis. Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dapat terealisasi dengan baik, dilakukan secara ekonomis atau secara hemat dengan biaya yang minimal, serta merealisasikan program dan kegiatan yang menjadi tujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang tertuang dalam Renstra, untuk memberikan pelayanan pendidikan dari program yang dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat tanpa dipungut biaya.

Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari efisiensi

Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan (Ulum, 2004: 291). Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dikatakan efisien jika dapat menghasilkan *output* dengan hasil yang sebesar-besarnya dengan menggunakan *input* yang serendah-rendahnya. Sehingga suatu instansi pemerintah dapat dikatakan efisien jika suatu input tertentu dengan biaya yang minimal dapat menghasilkan *output* dengan hasil yang maksimal.

Berdasarkan tabel 2 dan 3 pengukuran kinerja kegiatan yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2013 secara umum dapat di nilai efisien. Indikator efisiensi terlihat dari pencapaian atau jumlah realisasi dari indikator keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam merealisasikan kegiatan operasi terhadap indikator masukan (*input*) yang digunakan. Kemampuan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dalam merealisasikan kegiatan maupun programnya dengan menggunakan sumber keuangan yang ada pada tabel 2 untuk mencapai hasil pencapaian kinerja sesuai target atau sesuai dengan perencanaan yang telah didijudkan dalam rencana Strategis. Dapat dilihat dari salah satu pencapaian kinerja pada 13 program kerja yang tertuang dalam rencana strategis rata-rata mencapai 69,11% (tabel 3). Suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan atau programnya dikatakan efisien jika mampu menghasilkan *output* tertentu tertentu dengan hasil yang sebesar-besarnya dengan menggunakan input yang serendah-rendahnya. Hal ini tercermin dari pernyataan salah satu staff Bagian Pengembangan dan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo: "Dengan adanya input sumber dana yang seminimal mungkin bisa di dapat hasil output yang maksimal atau lebih dari rencana target hal ini dapat di tekan biaya pengeluarannya tetapi dari peningkatan pelayanan pendidikan tersebut masyarakat dapat mengetahui tujuan dari program yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo".

Dengan demikian, dari *input* yang seminimal mungkin dapat di peroleh hasil *output* yang maksimal sehingga *output* yang di hasilkan dari tahun ke tahun lebih dari rencana dari target awal, sehingga kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2013 dapat dikatakan efisien.

Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo di tinjau dari efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang di tetapkan (Ulum, 2004: 291). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja (Efektivitas) = (Realisasi/Rencana) x 100 %

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator kinerja sasaran atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut: a) Jika hasil capaian kegiatan lebih dari 85% maka dapat dikatakan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo sangat baik; b) Jika hasil capaian kegiatan lebih dari 70% namun kurang dari 85% maka dapat dikatakan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo berhasil; c) Jika hasil capaian kegiatan lebih dari 55% namun kurang dari 70% maka dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo cukup berhasil; d) Jika hasil capaian kegiatan

kurang dari 55% maka dapat dikatakan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tidak berhasil.

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

1. Kinerja Program kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan *output* dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 16
Pencapaian Target Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013

No	Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Ukuran Pencapaian	Kategori
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	100	91,72	89,65	>85%	SB
2	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	85	95,89	113,61	>85%	SB
3	Programn Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	25	58,26	141,58	>85%	SB
4	Program Pendidikan anak usia dini	100	75,13	68,91	<70%	CB
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	100	82,62	78,28	>70%	B
6	Program Pendidikan Menengah	100	26,90	8,63	<55%	KB
7	Program Pendidikan Non Formal	100	29,57	11,96	<55%	KB
8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100	59,26	49,08	<55%	KB
9	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	100	62,14	52,68	< 55%	KB
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	100	90,12	87,65	>85%	SB
11	Program Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	100	93,39	91,74	>85%	SB
12	Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan	100	43,96	29,95	<55%	KB
13	Program peningkatan disiplin aparatur	100	89,49	86,86	>85%	SB

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan tabel 16 pengukuran kinerja kegiatan, dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2013 secara umum dapat di nilai efektif karena rencana program kerja dan kegiatan operasi organisasi sektor publik yang di wujudkan dalam indikator kinerja sasaran telah berhasil menjalankan tujuan organisasi dalam mencapai dan merealisasikan program sesuai capaian kinerja yang diharapkan. Hal ini terlihat dari hasil-hasil capaian yang ada.

Dari tabel 16 diatas terlihat capaian terendah pada salah satu program yakni Program pendidikan menengah yang hanya mencapai 8,63% dari target yang diinginkan, sehingga dapat dinilai bahwa Program pendidikan menengah yang tertuang dalam rencana strategis belum cukup dilaksanakan dengan baik sesuai dengan visi dinas pendidikan. Hal ini juga tercermin dari pernyataan Kepala Bagian Pengembangan dan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo: "Program pendidikan menengah, yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo kurang berhasil hal ini tercermin dari minimya capaian yang dihasilkan hanya sebesar 8,63% dari target, dikarenakan tahun 2013 dinas pendidikan tidak terlalu banyak mengeluarkan anggaran dana untuk biaya renovasi bangunan maupun kegiatan lainya yang berhubungan dengan progam pendidikan menengah. hal tersebut terjadi karena pada tahun sebelumnya lebih dari 65% bangunan sekolah sudah direnovasi".

Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo sebagai organisasi sektor publik yang menangani pelayanan publik di bidang pendidikan berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Di dalam tabel pengukuran kinerja kegiatan (terlampir pada tabel 16) tahun 2013, salah satu program yakni Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang mencapai 141,58%, sehingga dapat dinilai bahwa Rakornis Administrasi Kepegawaian dan keuangan yang tertuang dalam rencana strategis telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan visi dinas pendidikan. Hal ini juga tercermin dari pernyataan Kepala Bagian Pengembangan dan Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo:

"Dengan adanya program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, maka tujuan keberhasilan program dapat di ketahui dari hasilnya karena dapat dilihat peningkatan anggaran keuangan yang digunakan untuk menunjang administrasi kepegawaian yang terus meningkat dari tiap tahunnya".

Dengan demikian dari tahun ke tahun Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tujuan keberhasilan program dapat terlihat dari hasilnya dan program yang menjadi tujuan dari program Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo juga mencapai tingkat keberhasilan yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sehingga dapat dikatakan tujuan maupun program kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2013 dikatakan efektif.

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggung-jawaban dan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut. Dalam penyajian pelaporan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo sudah disajikan sesuai dengan pedoman PP no. 8 tahun 2006, disebutkan bahwa laporan kinerja berisi tentang ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Pelaporan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dalam pengukuran kinerja tahun 2013 telah memuat tentang keluaran dan hasil yang telah dicapai dari masing-masing program kegiatan kerja, secara keseluruhan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo telah dapat melaksanakan pelayanan pendidikan, baik kegiatan yang bersifat administrasi ketatausahaan maupun yang bersifat teknik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pelaporan kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dalam menyajikan pelaporan kinerja dikatakan sudah sesuai dengan PP No. 8 tahun 2006. Dimana dalam pasal 17 ayat 1 PP No. 8 tahun 2006 disebutkan bahwa laporan kinerja sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2, berisi tentang ringkasan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD; (2) Dalam menilai kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo menggunakan *value for money*, dengan instrumen penilaian adalah ekonomis, efisiensi dan efektivitas; (3) Berdasarkan hasil penelitian pada kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2013 ditinjau dari segi ekonomi menunjukkan hasil yang relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai program yang disiapkan untuk mendapatkan hasil mampu dilaksanakan dengan biaya minimum namun tidak mengubah standart yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo tersebut dapat mengestimasi jumlah anggaran yang dibuat lebih kecil dari hasil realisasinya; (4) Ditinjau dari efisiensi berdasarkan tabel pengukuran kinerja kegiatan, dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 secara keseluruhan dapat dikatakan efisien. Indikator efisien dapat dilihat dari pencapaian atau jumlah realisasi dari setiap indikator keluaran (*output*) yang dihasilkan dalam mewujudkan kegiatan pelayanan pendidikan terhadap indikator masukan (*input*) yang digunakan dalam hal ini adalah anggaran; (5) Ditinjau dari efektivitasnya, berdasarkan tabel pengukuran kinerja kegiatan, dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013 secara keseluruhan dapat dinilai efektif, karena adanya rencana dalam penyusunan program dan kegiatan operasi organisasi diwujudkan dalam indikator kinerja sasaran telah berhasil dalam menjalankan tujuan organisasi dalam mencapai dan merealisasikan program sesuai dengan kinerja yang diharapkan, hal ini tampak dari hasil-hasil realisasi pencapaian indikator.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut: (1) Hasil penilaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo hendaknya tidak dijadikan sebagai alat untuk mengukur kinerja saja melainkan untuk kepentingan lainnya sebagai pengambilan keputusan untuk tahun yang akan datang; (2) Meskipun kinerja efisiensi dan efektivitas dinas pendidikan tercapai, namun demikian masih diperlukan pengembangan terhadap indikator kinerja *Value For Money*, sehingga dapat menjelaskan secara komprehensif capaian kinerja dinas pendidikan, baik dilihat dari kemampuan manajemen dalam mendapat dan menggunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki, mampu dalam mencapai tujuan operasional; (3) Keberhasilan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2013 lebih dijadikan motivasi bagi seluruh pegawai dinas pendidikan agar selalu meningkatkan kinerjanya secara terus menerus untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan; (4) Dalam pengalokasian anggaran dana dari tahun ke tahun ditekan seminimal mungkin, dan dengan realisasi yang lebih kecil dibandingkan dengan anggaran. Sehingga diharapkan dalam penganggaran tahun berikutnya bisa lebih minimal juga seperti realisasi dari tahun sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, D. 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makasar Melalui Pendekatan *Value For Money*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Andriani, S. 2012. Pengukuran Kinerja dengan Prinsip *Value For Money* Pemerintah Kota Batu. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No.1 : 1-20, Januari.
- Azizah, R. 2010. Analisis *Value for Money* Pada Penerapapan *Sunset Policy* (Studi Kasus pada KPP Pratama Pasuruan). Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. PT. Erlangga. Yogyakarta.
- Herawati, F. A. 2012. Analisis *Value For Money* Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik Pada Stasiun Kereta Api Kota Surabaya. *E-Journal*. Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Kurnia, R. 2011. *Value For Money* Sebagai Sistem Pengukuran Kinerja Keuangan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Dengan Adanya Penerapan Sistem Keuangan Terintegrasi. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Cetakan Kedua. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, M. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- _____ 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Moleong, L.J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya. Bandung.
- Nilasari, D. 2009. Analisis Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Nugrahani, T. S. 2007. Analisis Penerapan Konsep *Value For Money* pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akmenika UPY* Vol. 1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 1999. PP no. 7 tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2006. PP no. 8 tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2012. PP no 70 tahun 2012 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 1999. UU no 22 tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Subastian, A. 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya Melalui Pendekatan *Value For Money*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cetakan kedua. Alfabeta. Bandung.
- Ulum, H. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.

